

Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas Kinerja LPSE NTB pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026

Ni Luh Hantariani^{1*}, Ida Ayu Nyoman Sutriani²

¹Program Studi Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

² Program Studi Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

*Penulis Korespondensi: niluhhantariani@gmail.com¹

Abstract. *This study analyzes budget realization at the Government Procurement Bureau of West Nusa Tenggara (NTB) Province for the 2026 fiscal year and assesses the effectiveness of the NTB Electronic Procurement Service (LPSE) based on that analysis. A quantitative descriptive method was applied using secondary data from the 2026 Budget Implementation Document (DPA), the September 2026 Budget Realization Report, and NTB procurement data on INAPROC accessed on 16 October 2026. Budget effectiveness was calculated as the ratio of realization to the cumulative target in the DPA and classified using the criteria of Minister of Home Affairs Decree Number 690.900.327 of 1996. Spending up to September 2026 reached IDR 917,661,947, or 63.40% of the IDR 1,447,499,000 budget. Against the cumulative target of IDR 1,162,285,500, budget effectiveness was 78.95%, which falls into the less effective category. Capital expenditure had the highest absorption 93.59%, while expenditure on goods had the lowest 26.21%. On the service side, the realization of provider-based procurement plans reached only 56.86% of planned value and 38.33% of planned packages, although about 79% of the fiscal year had elapsed. The study concludes that the performance of NTB LPSE in the 2026 fiscal year was less effective and that planning accuracy and routine monitoring of realization need to be strengthened.*

Keywords: *Budget realization; budget effectiveness; LPSE; government procurement; NTB Procurement Bureau.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2026 serta menilai efektivitas kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB berdasarkan hasil analisis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Data sekunder diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2026, dan data pengadaan Provinsi NTB pada INAPROC yang diakses pada 16 Oktober 2026. Efektivitas anggaran dihitung dari perbandingan realisasi dengan target kumulatif pada DPA dan dinilai menurut kriteria Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja sampai dengan September 2026 sebesar Rp917.661.947 atau 63,40% dari anggaran Rp1.447.499.000. Terhadap target kumulatif sebesar Rp1.162.285.500, tingkat efektivitas anggaran mencapai 78,95% dan masuk kategori kurang efektif. Serapan tertinggi terdapat pada belanja modal 93,59% dan terendah pada belanja barang 26,21%. Pada sisi layanan, realisasi rencana pengadaan melalui penyedia baru mencapai 56,86% dari nilai dan 38,33% dari jumlah paket, padahal sekitar 79% tahun anggaran telah berjalan. Dengan demikian, kinerja LPSE NTB pada Tahun Anggaran 2026 dinilai kurang efektif dan perlu dipercepat melalui perencanaan yang lebih akurat serta pemantauan realisasi yang lebih rutin.

Kata kunci: Realisasi anggaran; efektivitas anggaran; LPSE; pengadaan barang dan jasa; Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTB.

1. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan penggunaan anggaran negara maupun daerah (Gustiono, 2025; Purba & R, 2026; Rahardjo et al., 2022). Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berjalan secara efisien memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif (Ainun et al., 2026; Budianto et al., 2021; Ramadhani & Fauzi, 2026). Untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam proses pengadaan, pemerintah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Panggalo et al., 2025). Penerapan sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan, menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik, serta mendukung penggunaan anggaran secara efektif. Namun, keberadaan sistem elektronik saja belum menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan berjalan optimal. Muharram et al. (2025) menjelaskan bahwa pengadaan secara konvensional cenderung menghadapi permasalahan berupa birokrasi yang berbelit, pemborosan anggaran, dan rendahnya transparansi. Sebaliknya, penelitian Chamsudi et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan e-procurement dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan. Oleh karena itu, efektivitas kinerja layanan pengadaan perlu dinilai untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengadaan pemerintah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pada tingkat daerah. Penelitian di Kota Pariaman menunjukkan bahwa penerapan LPSE masih menghadapi permasalahan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan e-procurement (Putri et al., 2021). Sementara itu, penelitian pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan bahwa prosedur e-procurement telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat 13 paket pengadaan dengan nilai penawaran terkoreksi Rp0 selama 2017–2020 dan 76 paket lelang tanpa nama pemenang pada 2017–2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan informasi pengadaan untuk publik masih perlu diperhatikan (Rifaid & Zulkarnain, 2021). Temuan ini menjadi gambaran bahwa kinerja layanan pengadaan tidak hanya dinilai dari terlaksananya prosedur, tetapi juga dari kelengkapan informasi, ketepatan pelaksanaan,

dan keterbukaan layanan. Dengan demikian, kinerja LPSE perlu dievaluasi secara objektif agar dapat diketahui tingkat pencapaiannya dalam mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penilaian kinerja layanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan anggaran, karena kegiatan LPSE dibiayai dan dijalankan melalui anggaran unit yang menaunginya. Efektivitas merupakan konsep krusial yang mengukur kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan efektif jika mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan (Handayani et al., 2024). Dalam konteks anggaran, keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang tersedia, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Suprianto et al., 2026). Karena itu, realisasi anggaran, yaitu perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang benar-benar digunakan, dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah kegiatan telah berjalan sesuai target. Rahmawati et al. (2021) menemukan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sejalan dengan itu, Alif'ia et al. (2025) menekankan pentingnya kompetensi pegawai, pemahaman terhadap regulasi, dan penguasaan sistem keuangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Febriyanti et al. (2026) juga menjelaskan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran di sektor publik membutuhkan kualitas dokumen perencanaan serta komitmen pegawai dalam melaksanakan program. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran perlu dianalisis berdasarkan indikator yang sesuai, seperti kesesuaian realisasi dengan rencana, tingkat pencapaian anggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unit yang menangani urusan pengadaan barang dan jasa perlu mendapatkan perhatian dalam evaluasi kinerja LPSE. Pada Tahun Anggaran 2026, realisasi anggaran dapat dianalisis untuk mengetahui sejauh mana rencana anggaran dilaksanakan sesuai target. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk menilai apakah kinerja LPSE sebagai layanan pengadaan secara elektronik telah berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, penilaian tersebut perlu didasarkan pada data yang terukur, bukan hanya pada asumsi atau

gambaran umum mengenai pelaksanaan pengadaan. Oleh karena itu, data anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi, serta data pengadaan yang tersedia melalui sistem informasi pengadaan pemerintah dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “**Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas Kinerja LPSE NTB pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026.**” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja LPSE berdasarkan data sekunder yang tersedia, kemudian menilai tingkat efektivitasnya menurut kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan atau pengaruh secara statistik antara anggaran dan kinerja LPSE, melainkan berfokus pada penilaian efektivitas kinerja melalui analisis realisasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis realisasi anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 serta menilai efektivitas kinerja LPSE NTB berdasarkan hasil analisis tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola anggaran dan pengelola LPSE dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen ekonomi dan pengelolaan pengadaan pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, maupun pemerintah desa yang dibiayai APBN, APBD, atau APB Desa, dengan proses sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan (Republik Indonesia, 2025). Ketentuan ini bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Republik Indonesia, 2018, 2021, 2025). Proses pengadaan didukung sistem elektronik yang dikelola melalui LPSE. Panggalo et al. (2025) menelaah peran sistem LPSE dalam meningkatkan proses pengadaan, sedangkan Ramadhani & Fauzi (2026) mengkaji pelaksanaan pelayanan administrasi pada LPSE. Pengadaan secara elektronik juga dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensi pengadaan, efisiensi waktu dan biaya, serta

akuntabilitas dan transparansi (Ainun et al., 2026; Chamsudi et al., 2021; Rahardjo et al., 2022).

Anggaran adalah rencana keuangan untuk satu tahun anggaran, sedangkan realisasi anggaran menunjukkan dana yang benar-benar digunakan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat dipakai untuk menilai pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan (Kahar et al., 2026; Zuri et al., 2026). Dalam laporan tersebut belanja dikelompokkan, antara lain, menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti alat tulis, jasa kantor, pemeliharaan, dan perjalanan dinas, sedangkan belanja modal digunakan untuk memperoleh aset seperti komputer dan peralatan kantor.

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai (Handayani et al., 2024; Kahar et al., 2026). Pada anggaran belanja, efektivitas umumnya dihitung sebagai perbandingan antara realisasi belanja dengan target anggaran; semakin besar rasio tersebut, semakin baik kinerja keuangan belanja (Bimawardana et al., 2025; Kahar et al., 2026). Hasil rasio kemudian dikelompokkan ke dalam kategori, misalnya cukup efektif pada capaian sekitar 85% dan efektif pada capaian sekitar 95% (Bimawardana et al., 2025). Realisasi yang rendah belum tentu berarti kegiatan tidak berjalan, tetapi dapat menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan belum sejalan. Rahmawati et al. (2021) dan Alif'ia et al. (2025) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kompetensi pegawai, dan pemahaman regulasi berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, sedangkan Febriyanti et al. (2026) menekankan kualitas dokumen perencanaan dan komitmen pegawai. Perubahan kebijakan juga dapat memengaruhi capaian; pagu yang paling rendah dan kebijakan refocusing anggaran disebut sebagai alasan efisiensi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram pada tahun 2020 hanya berada pada kategori cukup efisien (Wati et al., 2022).

Kinerja LPSE dalam penelitian ini dipahami dari sisi layanan pengadaan yang tercatat dalam sistem informasi pengadaan, yaitu seberapa besar paket dalam rencana umum pengadaan (RUP) yang telah terealisasi pada tahap pemilihan dan kontrak, serta bagaimana pelaksanaannya menurut metode dan jenis pengadaan. Indikator ini dipakai karena mutu layanan pengadaan tidak hanya dilihat dari prosedur yang berjalan, tetapi

juga dari ketepatan pelaksanaan dan keterbukaan informasi (Rifaed & Zulkarnain, 2021). Capaian anggaran Biro dan capaian realisasi pengadaan dibaca bersama untuk memberi gambaran efektivitas kinerja LPSE, tanpa menguji pengaruh statistik di antara keduanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas anggaran dan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berbentuk angka secara objektif dan terukur (Bimawardana et al., 2025). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), data realisasi anggaran, serta data kinerja LPSE NTB yang tersedia melalui INAPROC atau sistem informasi resmi terkait. Penggunaan data sekunder bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian melalui dokumen yang telah tersedia (Zuri et al., 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta mencatat data dari dokumen anggaran dan data kinerja LPSE NTB. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat.

Objek penelitian adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2026. Dokumen yang dianalisis berupa DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat pagu dan rencana realisasi belanja per bulan pada 28 sub kegiatan Biro, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bulan September 2026 yang ditandatangani pada 30 September 2026, serta data pengadaan Provinsi NTB pada situs data INAPROC yang diakses pada 16 Oktober 2026. Data INAPROC mencakup seluruh satuan kerja pada Pemerintah Provinsi NTB, sehingga digunakan sebagai gambaran kinerja layanan pengadaan yang difasilitasi LPSE, bukan sebagai data khusus Biro.

Kriteria efektivitas yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dan lazim dipakai pada penelitian efektivitas belanja daerah

(Saparudin, 2025). Kriteria yang sama dipakai sebagai pendekatan untuk membaca realisasi pengadaan kinerja LPSE.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria	Sangat efektif	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Tidak efektif
Efektivitas (%)	> 100	90 – 100	80 – < 90	60 – < 80	< 60

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.447.499.000, terdiri atas belanja operasi Rp1.326.999.000 (91,68%) dan belanja modal Rp120.500.000 (8,32%). Sampai dengan 30 September 2026 realisasi belanja mencapai Rp917.661.947 atau 63,40% dari anggaran, sehingga tersisa Rp529.837.053. Rincian per jenis belanja disajikan pada Tabel 2.

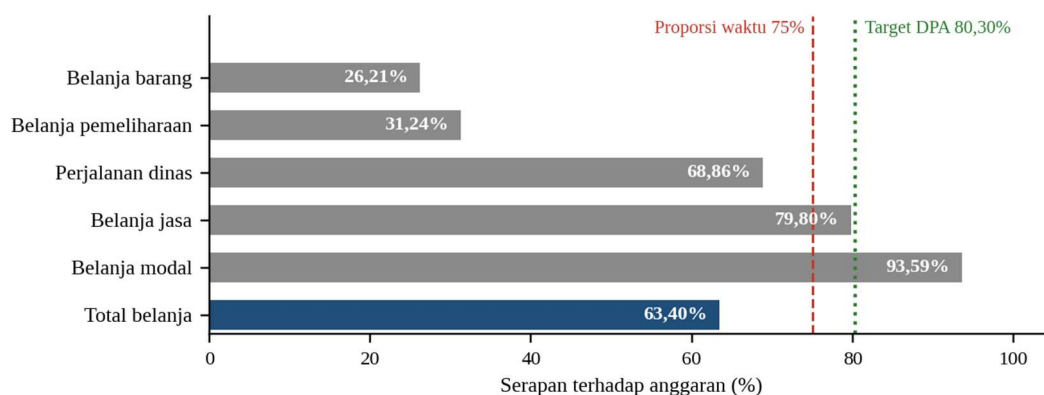
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Biro PBJ sampai dengan 30 September 2026 (Rp)

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)	Realisasi 2025
Belanja barang	344.385.000	90.253.137	26,21	228.913.589
Belanja jasa	444.404.000	354.619.396	79,80	512.767.500
Belanja pemeliharaan	28.210.000	8.813.250	31,24	12.430.000
Belanja perjalanan dinas	510.000.000	351.195.904	68,86	415.249.065
Jumlah belanja operasi	1.326.999.000	804.881.687	60,65	1.169.360.154
Belanja modal	120.500.000	112.780.260	93,59	82.940.500
Jumlah belanja	1.447.499.000	917.661.947	63,40	1.252.300.654

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Biro PBJ Bulan September 2026, diolah.

Serapan tertinggi terdapat pada belanja modal sebesar 93,59%, yang digunakan untuk komputer, peralatan komputer, lemari arsip, dan alat pendingin. Pada laporan, akun personal computer tercatat Rp79.016.460 dari anggaran Rp60.000.000 (131,69%), sedangkan akun peralatan personal computer baru Rp11.854.800 dari Rp32.000.000 (37,05%). Jika kedua akun digabung, realisasi Rp90.871.260 dari anggaran Rp92.000.000 (98,77%), sehingga selisih pada masing-masing akun tampaknya berkaitan dengan pengelompokan akun dan bukan kelebihan belanja secara keseluruhan; hal ini perlu dipastikan melalui dokumen pergeseran anggaran. Belanja jasa terserap 79,80%, terutama untuk honorarium tim katalog dan clearing house sebesar Rp238.000.000 (67,11% dari realisasi belanja jasa), langganan internet Rp52.971.500, dan jasa PPPK paruh waktu Rp45.416.664. Belanja perjalanan dinas terserap 68,86%.

Belanja barang hanya terserap 26,21%, terendah di antara semua jenis belanja. Penyebab utamanya adalah makanan dan minuman rapat yang baru Rp28.165.000 dari Rp162.770.000 (17,30%) dan bahan cetak Rp13.306.322 dari Rp56.014.000 (23,76%), sementara jamuan tamu Rp10.000.000 belum terpakai. Selisih anggaran dan realisasi makanan dan minuman rapat sebesar Rp134.605.000 setara 52,97% dari seluruh sisa belanja barang, sehingga rapat dan kegiatan pembinaan yang dijadwalkan dalam DPA tampaknya belum banyak terlaksana. Belanja pemeliharaan juga rendah (31,24%). Dibandingkan dengan realisasi 2025, realisasi sampai September 2026 sudah mencapai 73,28% dari total satu tahun sebelumnya; belanja modal bahkan telah melampaui 2025, sedangkan belanja barang baru 39,43% dari realisasi 2025. Gambar 1 menunjukkan posisi tiap jenis belanja terhadap proporsi waktu dan target DPA.



Gambar 1. Serapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan 30 September 2026

B. Efektivitas Realisasi Anggaran

Serapan terhadap pagu belum cukup untuk menilai efektivitas karena belanja tidak direncanakan merata setiap bulan. DPA memuat rencana realisasi bulanan untuk 28 sub kegiatan Biro. Jika dijumlahkan, rencana belanja sampai September 2026 adalah Rp1.162.285.500 atau 80,30% dari pagu, lebih tinggi daripada proporsi waktu 75% karena sejumlah belanja besar, seperti perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan peralatan, dijadwalkan pada triwulan kedua dan ketiga. Perbandingan realisasi dengan target tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Efektivitas Realisasi Anggaran Biro PBJ Tahun Anggaran 2026 (Rp)

Periode	Target (DPA)	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
Sampai Agustus 2026	1.091.365.000	813.314.367	74,52	Kurang efektif
September 2026	70.920.500	104.347.580	147,13	Sangat efektif
Sampai September 2026	1.162.285.500	917.661.947	78,95	Kurang efektif

Sumber: DPA-SKPD Sekretariat Daerah 2026 dan Laporan Realisasi Anggaran September 2026, diolah.

Efektivitas kumulatif sampai September 2026 sebesar 78,95% dan termasuk kategori kurang efektif, hanya 1,05 poin persentase di bawah batas cukup efektif (80%). Selisih antara target dan realisasi mencapai Rp244.623.553. Sampai Agustus capaian baru 74,52%; pada September realisasi bulanan Rp104.347.580 melampaui rencana Rp70.920.500 sehingga capaian kumulatif naik. Pola ini menunjukkan belanja berjalan lambat pada awal tahun dan baru dikejar pada triwulan ketiga. Kahar et al. (2026) mencatat bahwa realisasi di bawah target dapat mengindikasikan lemahnya perencanaan, kemampuan pelaksanaan program, serta pengawasan internal; hal serupa perlu diperiksa pada Biro, terutama pada kegiatan rapat dan pembinaan yang realisasinya rendah.

Anggaran yang berkaitan langsung dengan layanan pengadaan elektronik berada pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang terdiri atas tiga sub kegiatan dengan pagu Rp163.283.000 (11,28% dari anggaran Biro) dan rencana realisasi Rp142.107.000 (87,03%) sampai September. Laporan realisasi tidak disusun per sub kegiatan, sehingga realisasinya tidak dapat dihitung langsung. Sebagai pendekatan,

langganan internet empat titik (LPSE, Biro PBJ, ruang rapat, dan pengguna anggaran) dengan anggaran Rp83.904.000 terealisasi Rp52.971.500, atau 84,18% dari rencana sampai September sebesar Rp62.928.000. Tidak ada pembayaran pada September, sehingga realisasinya baru setara sekitar 7,6 bulan dari 9 bulan rencana. Adapun belanja modal komputer dan peralatan komputer telah terserap hampir penuh (98,77%).

C. Kinerja LPSE NTB pada Data INAPROC

Data INAPROC Provinsi NTB yang diakses pada 16 Oktober 2026 mencatat 12.613 paket RUP dengan nilai Rp2.537.260.411.938, terdiri atas pengadaan melalui penyedia Rp900.992.593.501 (35,51%; 8.967 paket) dan swakelola Rp1.636.267.818.437 (64,49%; 3.646 paket). Total RUP berada pada 152,64% dari belanja pengadaan sebesar Rp1.662.263.260.420, artinya nilai rencana yang diumumkan melebihi belanja pengadaan. Penyebabnya tidak dapat dipastikan dari data yang tersedia dan perlu diverifikasi karena dapat membuat persentase realisasi tampak lebih rendah; catatan ini sejalan dengan temuan Rifaid & Zulkarnain (2021) bahwa kelengkapan informasi pengadaan di NTB masih perlu diperhatikan.

Realisasi total mencapai Rp515.860.214.597 atau 20,33% dari nilai RUP (3.496 paket atau 27,72%), terdiri atas realisasi pemilihan Rp100.567.933.556 (3,96%) dan kontrak Rp415.292.281.041 (16,37%). Realisasi penyedia sebesar 56,86% dari rencana (Rp512.289.690.364), sedangkan realisasi swakelola hanya 0,22% (Rp3.570.524.233) sehingga menekan capaian total. INAPROC juga menandai 6.715 paket sebagai perlu atensi karena belum terealisasi dan telah melewati jadwal, atau 53,24% dari seluruh paket. Tabel 4 menyajikan realisasi pengadaan penyedia menurut metode dan jenis.

Tabel 4. Realisasi RUP Penyedia Provinsi NTB menurut Metode Pemilihan dan Jenis Pengadaan

Kategori	RUP (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Nilai (%)	Paket RUP	Paket real.	Paket (%)
Metode pemilihan						
Tender	14,81	4,90	33,09	7	4	57,14
Seleksi	11,57	9,46	81,77	4	3	75,00
E-purchasing	296,23	223,53	75,46	1.872	1.369	73,13
Pengadaan langsung	538,04	260,75	48,46	6.944	2.042	29,41
Penunjukan langsung	17,81	13,23	74,26	76	11	14,47
Dikecualikan	22,54	0,42	1,87	64	8	12,50
Jenis pengadaan						
Pekerjaan konstruksi	373,28	243,09	65,12	1.884	1.263	67,04
Pengadaan barang	392,46	214,54	54,67	5.751	1.656	28,79
Jasa konsultansi	33,64	21,61	64,24	381	227	59,58
Jasa lainnya	101,61	33,05	32,53	951	291	30,60
Jumlah penyedia	900,99	512,29	56,86	8.967	3.437	38,33

Sumber: data.inaproc.id (Provinsi NTB, 2026), diakses 16 Oktober 2026, diolah.

Berdasarkan metode, e-purchasing (Rp223,53 miliar) dan pengadaan langsung (Rp260,75 miliar) menyumbang 94,53% nilai realisasi penyedia, sedangkan tender dan seleksi hanya 2,80%. Pengadaan melalui katalog elektronik berjalan relatif baik (75,46% nilai dan 73,13% paket), selaras dengan realisasi honorarium tim katalog dan clearing house pada anggaran Biro. Sebaliknya, pengadaan langsung yang berjumlah 6.944 paket baru terealisasi 29,41% paketnya, dan kategori dikecualikan hanya 1,87% nilainya.

Menurut jenis, pekerjaan konstruksi tertinggi (65,12% nilai), sementara jasa lainnya paling rendah (32,53%) dan pengadaan barang baru terealisasi 28,79% pakatnya.

Dari sisi kebijakan, rencana penyedia untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) sebesar Rp816.168.054.520 (90,59% dari rencana penyedia, setara 49,10% belanja pengadaan) berada di atas kewajiban alokasi minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi (Republik Indonesia, 2021). Realisasi UMKK baru Rp334.588.409.490 (40,99% dari rencana UMKK) dan realisasi produk dalam negeri Rp443.116.416.780 (50,30% dari rencana PDN).

D. Penilaian Efektivitas Kinerja LPSE NTB

Tabel 5 merangkum penilaian dari kedua sisi. Capaian pengadaan dibandingkan dengan proporsi waktu berjalan (79,18%), lalu rasionya (Persamaan 6) dikelompokkan menurut kriteria pada Tabel 1.

Tabel 5. Ringkasan Penilaian Efektivitas Kinerja LPSE NTB Tahun Anggaran 2026

Indikator	Capaian (%)	Pembanding (%)	Rasio (%)	Kriteria
Efektivitas anggaran Biro (realisasi/target DPA)	78,95	100,00	78,95	Kurang efektif
Realisasi RUP penyedia (nilai)	56,86	79,18	71,81	Kurang efektif
Realisasi RUP penyedia (paket)	38,33	79,18	48,41	Tidak efektif
Realisasi total RUP (nilai)	20,33	79,18	25,68	Tidak efektif
Realisasi e-purchasing (nilai)	75,46	79,18	95,31	Efektif

Sumber: Tabel 3 dan Tabel 4, diolah. Pembanding anggaran adalah target DPA; pembanding pengadaan adalah proporsi waktu berjalan.

Berdasarkan Tabel 5, kinerja LPSE NTB pada Tahun Anggaran 2026 dinilai kurang efektif. Penilaian ini bertumpu pada tiga hal. Pertama, efektivitas anggaran Biro (78,95%) berada pada kategori kurang efektif. Kedua, realisasi pengadaan melalui penyedia belum mengikuti waktu yang berjalan, yaitu 71,81% dari proporsi waktu untuk nilai dan 48,41%

untuk jumlah paket. Ketiga, layanan yang sudah berjalan baik terbatas pada e-purchasing. Kedua sisi menunjukkan arah yang sama, yaitu pelaksanaan lebih lambat daripada rencana, dan rendahnya belanja rapat serta pembinaan pada anggaran Biro terjadi bersamaan dengan rendahnya realisasi pengadaan langsung dan jasa lainnya. Hubungan ini bersifat deskriptif karena penelitian tidak menguji sebab-akibat.

Beberapa faktor dapat menjelaskan kondisi tersebut, tetapi perlu dipastikan dengan data tambahan, yaitu kualitas perencanaan RUP, kompetensi pelaksana (Rahmawati et al., 2021; Alifia et al., 2025), serta kualitas dokumen perencanaan dan komitmen pegawai (Febriyanti et al., 2026). Penelitian ini juga memiliki keterbatasan: realisasi anggaran baru sampai September, data INAPROC mencakup seluruh satuan kerja provinsi dan dapat dipengaruhi waktu pembaruan data, laporan realisasi tidak dirinci per sub kegiatan, dan pengelompokan akun pada laporan tidak seluruhnya sama dengan DPA awal. Karena itu hasil ini sebaiknya dibaca sebagai gambaran posisi menjelang akhir tahun, bukan capaian akhir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Realisasi belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB sampai September 2026 sebesar Rp917.661.947 atau 63,40% dari anggaran Rp1.447.499.000. Serapan tertinggi terdapat pada belanja modal (93,59%) dan terendah pada belanja barang (26,21%). Terhadap target kumulatif DPA sebesar Rp1.162.285.500, efektivitas anggaran mencapai 78,95% dan termasuk kategori kurang efektif, meskipun realisasi September (147,13% dari rencana bulan itu) mulai mengejar ketertinggalan. Dari sisi layanan, data INAPROC menunjukkan realisasi pengadaan melalui penyedia sebesar 56,86% dari nilai dan 38,33% dari jumlah paket, sementara 79,18% tahun anggaran telah berjalan. Pengadaan melalui e-purchasing relatif baik (75,46%), tetapi pengadaan langsung, jasa lainnya, dan swakelola masih rendah. Dengan demikian, kinerja LPSE NTB pada Tahun Anggaran 2026 dinilai kurang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ainun, A., Jusmidah, & Fikri, M. (2026). Hubungan Penerapan Tender Elektronik dengan Efisiensi Waktu Dan Biaya Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 26(1), 62–74. <https://doi.org/10.35965/eco.v26i1.8706>
- Alifia, N. F., Hartati, S., & Febriantoko, J. (2025). Analisis Kinerja Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah: Studi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(2), 357–367.
<https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9931>
- Bimawardana, P. R., Mane, A., & Setiawan, L. (2025). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Economy Business Development*, 3(2), 249–254. <https://doi.org/10.56326/jebd.v3i2.3074>
- Budianto, D., Rarasati, A. D., & Nursin, A. (2021). Strategy for increasing tender success in Jakarta's e-tender construction project. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(2), 022052. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/2/022052>
- Chamsudi, D. H. M., Setyarto, A., Rahardjo, S., Sectio, D. I., Bijaksana, G., & Faturachman, M. R. (2021). Efektivitas dan Efisiensi e-Procurement Pengadaan Barang Konstruksi. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 1(2), 72–77. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl>
- Febriyanti, D., Intihanah, & Dharmawati, T. (2026). The Influence of Performance-Based Budgeting on Budget Absorption with Employee Commitment as a Moderating Variable at LPP RRI Kendari. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 105–122. <https://doi.org/10.37680/ijief.v6i2.10067>
- Gustiono, R. (2025). Efektivitas Penerapan Aplikasi Katalog Elektronik (E-Katalog) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(2), 74–87. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i2.6663>
- Handayani, S., Putri, M. O., Anwar, A. R., Dwitara, H. Y., & Puspasari, A. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(2), 279–286. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.274>
- Kahar, R. M., Saleh, H., & Abubakar, H. (2026). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Indonesian Journal of Business and Management*, 8(2), 878–884. <https://doi.org/10.35965/jbm.v8i2.5960>
- Muharram, M., Hariyati, D., & Rosintan Simanjuntak, L. (2025). Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa (E-Procurement) Pada LPSE dan E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1547–1559. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2277>
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo: Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...*, 1(2), 70–78. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992%0Ahttp://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/download/992/824>
- Purba, A. J., & R, S. H. N. (2026). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pematang Siantar. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 206–225. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i2.3207>

- Putri, T. D., Fauzan, & Yondrizal. (2021). Optimalisasi Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pembangunan Di Kota Pariaman. *Menara Ilmu*, 15(2), 84–98. <http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2952>
- Rahardjo, S., Bijaksana, G., Larasati, K., Chamsudi, D. H. M., Sitorus, P. P., & Kania, D. D. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP. *Jurnal Sistem Transportasi Dan Logistik*, 2(2), 82–90.
- Rahardjo, S., Bijaksana, G., Larasati, K., Chamsudi, D. H. M., Sitorus, P. P., Kania, D. D. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP. *Jurnal Sistem Transportasi Dan Logistik*, 2(2), 82–90.
- Rahmawati, R., Amir, A., & Junaidi, J. (2021). Evaluasi perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen manajemen sebagai pemoderasi pada satuan kerja kementerian agama Republik Indonesia di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 191–208. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11826>
- Ramadhani, G. M., & Fauzi, L. (2026). PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(4), 1065–1069.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025>
- Rifaid, & Zulkarnain. (2021). Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E- procurement) di Nusa Tenggara Barat 2017-2020. *Indonesian Governance Journal*, 04(01), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1636> Volume:
- Saparudin, M. (2025). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau Periode 2018 –2022. *Pencerah Publik*, 12(2), 62–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pencerah.v12i2.11879>
- Suprianto, Sumbawati, N. K., & Sapitri, I. (2026). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.58406/jeb.v14i2>

- Wati, Y. K., L, B. A. H., & Mariadi, Y. (2022). Analisis Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 243–259. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i2.6920>
- Zuri, R. P., Syawalina, C. F., & Agustina, M. (2026). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 3928–3939. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6754>